

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
LKJiP Tahun 2023



PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
DINAS PERTANIAN

2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023 selesai disusun.

Penyusunan LKJIP 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang di dalamnya menggambarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan sumber-sumber pembiayaan baik yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) Penugasan Bidang Pertanian.

Laporan ini diharapkan menjadi acuan untuk lebih memotivasi pelaksanaan kegiatan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*Good governance*) pada tahun berikutnya.

Demikian laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toraja Utara ini dibuat untuk menjadi bahan seperlunya.

Tallunglipu, Januari 2024

Kepala Dinas,

LUKAS P. DATUBARRI, SP.
Nip. : 197303041999031008

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Dasar Hukum	2
3. Tugas dan Fungsi Organisasi	4
4. Struktur Organisasi.....	6
5. Sumber Daya Manusia	7
6. Sistematika Penulisan.....	9
II. PERENCANAAN KINERJA	11
1. Renstra Dinas Pertanian	11
2. Rencana Kerja Dinas Pertanian Tahun 2023	16
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
1. Pengukuran Kinerja	19
2. Analisis Capaian Kinerja	21
3. Akuntabilitas Keuangan	27
IV. PENUTUP	30

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
1. Rincian pegawai Dinas pertanian tahun 2023.....	7
2. Pegawai Dinas Pertanian Tahun 2023 berdasarkan golongan	8
3. Pegawai Dinas Pertanian Tahun 2023 berdasarkan eselon.....	8
4. Pegawai Dinas Pertanian Tahun 2023 berdasarkan Pendidikan	9
5. Misi dan Tujuan.....	12
6. Penetapan Kinerja Tahun 2023.....	20
7. Pengukuran Indikator Kinerja	21
8. Hasil Capaian Kinerja	23
9. Capaian Kinerja tahun sebelumnya	23
10. Realiasi Kinerja dan Target RPJMD	24
11. Laporan Realisasi Kegiatan tahun 2023.....	25
12. Realiasi Belanja tahun 2023.....	26
13. Realisasi Pendapatan Tahun 2023.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik merupakan syarat dan kewajiban bagi setiap lembaga pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Dalam rangka itulah diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate dan rasional, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana secara berdaya dan berhasil guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sehubungan dengan hal tersebut, Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XI /MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang kemudian ditindak lanjuti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 perihal yang sama, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, azas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian umum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalitas dan azas akuntabilitas.

Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mulai dari

pejabat eselon II ke atas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya.

Pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui sistem akuntabilitas dan media pertanggung jawaban yang harus dilaksanakan secara periodik dan melembaga yang selanjutnya disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilaian akuntabilitas yang berwenang.

2. Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;



11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 – 2030;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026.
20. Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021 – 2026.



3. Tugas dan Fungsi Organisasi

Struktur organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 101 tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara.

Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut di atas, Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, membawahi :
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Tanaman Pangan, membawahi :
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
4. Bidang Hortikultura, membawahi :
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
5. Bidang Perkebunan, membawahi :
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
6. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi :
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
7. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, membawahi :
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
8. Bidang Penyuluhan, membawahi :
 - a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan fungsional
9. Jabatan Fungsional.
10. UPTD

Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Pertanian mempunyai tugas :

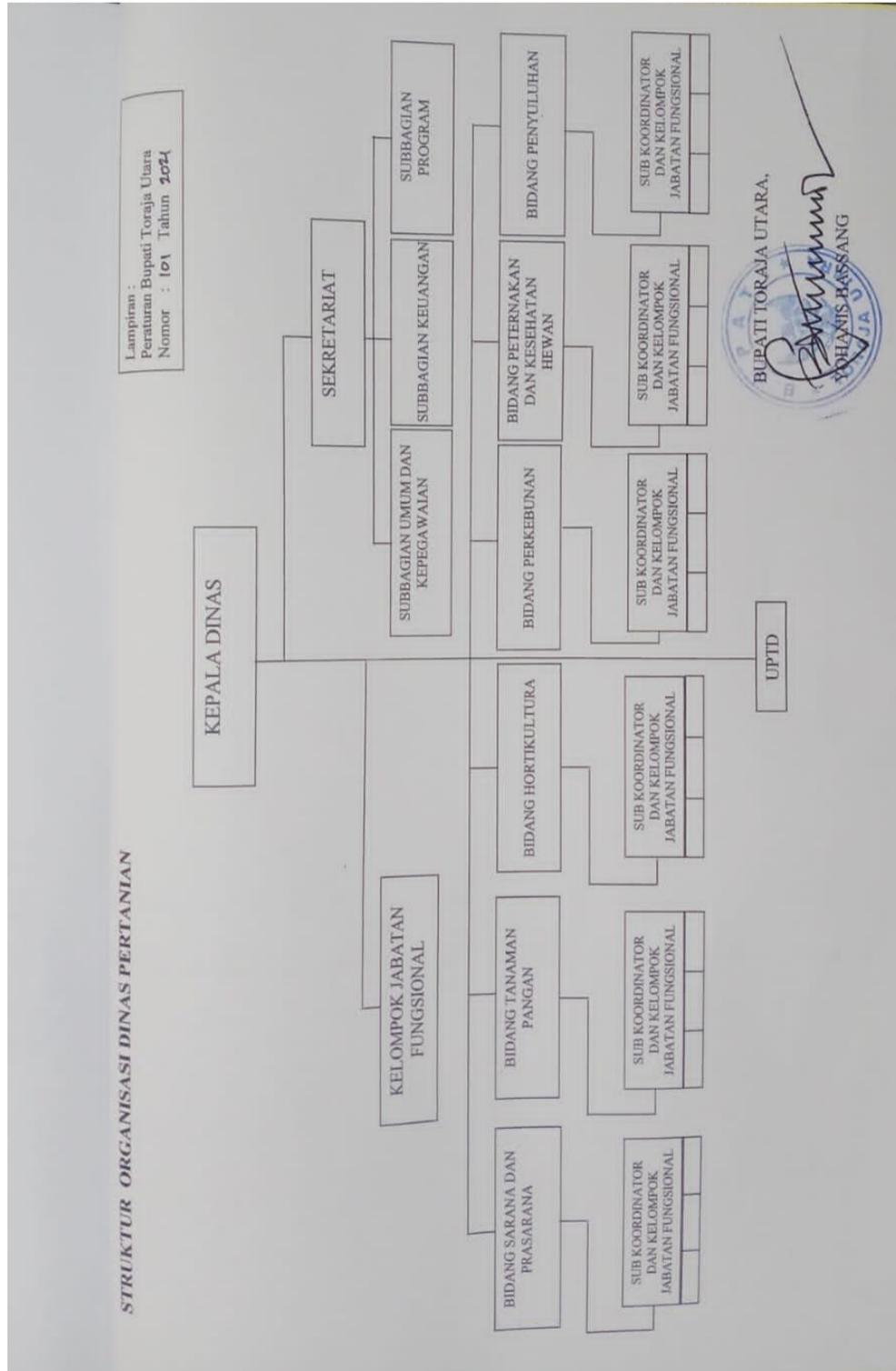
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pertanian;

- b. Penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, penyuluhan dan sarana prasarana;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan dinas;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4. Struktur Organisasi

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian Kabupaten Toraja utara memiliki struktur organisasi sebagai berikut :



5. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 sebanyak 122 orang terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris Dinas, 6 orang di Bagian Sekretariat, 4 orang di Bidang Tanaman Pangan, 4 orang di Bidang Hortikultura, 4 orang Bidang Prasarana dan Sarana, 6 orang di Bidang Perkebunan, 10 orang Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, 28 orang Bidang Penyuluhan, 11 orang PPPK, 43 orang Tenaga Honor Daerah, dan 4 orang Tenaga Honorarium Lepas Peternakan (THL-Peternakan). Selengkapnya mengenai rincian pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara tahun 2023 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

No.	Satuan Kerja	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Sekretariat	6
4.	Bidang Tanaman Pangan	4
5.	Bidang Hortikultura	4
6.	Bidang Prasarana dan Sarana	4
7.	Bidang Perkebunan	6
8.	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	10
9.	Bidang Penyuluhan	28
10.	PPPK	11
11.	Tenaga Honor Daerah	43
12.	THL-Peternakan	4
Jumlah		122

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara, 2023

Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara yang telah menduduki golongan IV sebanyak 15 orang, golongan III sebanyak 45 orang, golongan II sebanyak 4 orang, 11 orang PPPK dan 43 orang Tenaga Honor Daerah dan THL-Peternakan 4 orang. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara berdasarkan golongan disajikan pada Tabel 2.



Tabel 2. Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Golongan Tahun 2023

No.	GOLONGAN	JUMLAH (orang)
1.	IV.c	-
2.	IV.b	2
3.	IV.a	13
4.	III.d	26
5.	III.c	6
6.	III.b	6
7.	III.a	7
8.	II.d	2
9.	II.c	1
10.	II.b	1
11.	II.a	-
12.	I.d	-
13.	I.c	-
14.	I.b	-
15.	I.a	-
16.	PPPK	11
17.	Tenaga Honor Daerah	43
18.	THL-Peternakan	4
JUMLAH (Orang)		122

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara, 2023

Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara yang menduduki jabatan Struktural sebanyak 10 orang. Jumlah Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara berdasarkan Esselonering sebagaimana disajikan pada Tabel 3.

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara yang memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang pasca sarjana (S2) sebanyak 6 orang, jenjang sarjana (S1) sebanyak 54 orang, dan SMA sederajat sebanyak 4 orang. Rincian secara lengkap seperti disajikan pada Tabel 4.

Tabel 3. Pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Esselonering Tahun 2023

No.	ESELON	JUMLAH (Orang)
1.	II.b	1
2.	III.a	1
3.	III.b	6
4.	IV.a	2
JUMLAH (Orang)		12

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Tahun 2023

Tabel 4. Komposisi Pegawai ASN Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan (Orang)					
		SD	SMP	SMA	D1/D3	S1	S2
1.	Kepala Dinas	-	-	-	-	1	-
2.	Sekretaris Dinas	-	-	-	-	-	1
3.	Bagian Sekretariat	-	-	2	-	2	2
4.	Bidang Tanaman Pangan	-	-	-	-	4	-
5.	Bidang Hortikultura	-	-	-	-	3	1
6.	Bidang Prasarana dan Sarana	-	-	1	-	3	-
7.	Bidang Perkebunan	-	-	1	-	4	1
8.	Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	-	-	9	1
9.	Bidang Penyuluhan	-	-	1	1	26	-
JUMLAH		-	-	5	1	52	6

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara, 2023

6. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya, Laporan Kinerja ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara selama Tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) dibandingkan dengan perjanjian kinerja (*performance plan*) tahun 2023 menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Oleh karena itu, sistematika penyajian atas Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara selama tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan,

Penyajian data umum organisasi yang mencakup: (A) kedudukan; (B) tugas dan fungsi organisasi; (C) kegiatan dan layanan produk organisasi; (D) struktur organisasi; dan (E) sistematika penyajian.

Bab II – Perencanaan dan Perjanjian Kinerja,

Penyajian Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara dan Perjanjian Kinerja tahun 2023. Rencana Strategis mencakup pernyataan rencanan kerja dinas yang memuat program-program dan kegiatan prioritas

tujuan strategis, sasaran strategis, indikator kinerja utama serta program dan kegiatan yang menjadi acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dengan tujuan dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dari pemerintah daerah. Perjanjian Kinerja menggambarkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2023 beserta indikator keberhasilannya.

Bab III - Akuntabilitas Kinerja, Penyajian capaian kinerja beserta analisis kinerja yang memuat hasil pengukuran kinerja yang menguraikan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja. Dalam bab ini juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab IV – Penutup, Penyajian uraian ringkas akuntabilitas, perbaikan rencana kinerja, perbaikan pengukuran kinerja, perbaikan evaluasi kinerja, ringkasan capaian strategis dari Indikator Kinerja Program, kelemahan/hambatan dalam pencapaian sasaran strategis dan langkah-langkah perbaikan kinerja.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1. Rencana Strategis 2021 - 2026

Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 merupakan tahap pematangan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian produksi dan daya saing perekonomian dari sektor industri pengolahan berlandaskan keunggulan sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat demi terwujudnya perekonomian daerah yang kuat dan merata. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta isu-isu strategis yang terjadi di Kabupaten Toraja Utara, maka Visi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, yaitu : **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT TORAJA UTARA YANG MANDIRI BERBUDAYA DAN BERDAYA SAING"**.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah tersebut sebagai acuan. Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Toraja Utara, Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara berkontribusi untuk mewujudkan *Misi keempat* yaitu **"Reformasi Birokrasi"** dan *Misi Kelima* yaitu **"Penguatan Pertumbuhan Ekonomi"**.

Melalui misi kelima tersebut ditetapkan Tujuan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 yaitu meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi masyarakat. Telaahan terhadap visi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator kinerja dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di Kabupaten Toraja Utara dalam hubungannya dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Bupati Toraja Utara

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator Kinerja	Program
Misi 4 : Reformasi Birokrasi	Tujuan 4: Meningkatkan kualitas penyelenggaraan reformasi birokrasi	Sasaran 4: Meningkatnya akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Strategi 4: perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan akuntabilitas, peningkatan efisiensi dan efektifitas pengelolaan pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan public dengan memperhatikan sasaran Reformasi Birokrasi yaitu 1) bersih dan akuntabel; 2) efektif dan efisien; dan memiliki pelayanan public yang berkualitas	Tahun 2022 Perampingan organisasi birokrasi dan penyelerasan jabatan struktural ke jabatan fungsional Tahun 2023 Penguatan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan berbasis elektronik Tahun 2024 Pemantapan tata kelola keuangan dan asset daerah Tahun 2025 Penguatan sistem pengawasan internal dan kapabilitas APIP Tahun 2026 Perbaikan maturitas organisasi dan kapabilitas SDM pengadaan barang dan jasa	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
Misi 5 : Penguatan Pertumbuh	Tujuan 5 : Meningkatkan kesejahteraan	Sasaran 7 : Meningkatnya kualitas	Strategi 6 : Mengoptimalkan kemajuan teknologi	Tahun 2022 Pemulihan ekonomi dan reformasi structural	1. Pertumbuhan Sub	1. Program Penyediaan dan Pengembangan

LKJIP DINAS PERTANIAN KABUPATEN TORAJA UTARA

an ekonomi	masyarakat yang merata	pertumbuhan sektor-sektor perekonomian daerah	dan sarana produksi serta mendorong regenerasi petani dalam peningkatan produktivitas komoditas unggulan secara resilien	<p>Tahun 2023 Perlindungan dan pembinaan usaha mikro dan kecil khususnya dengan pelaku perempuan</p> <p>Tahun 2024 Penataan sarana/prasarana ekonomi terutama pasar</p> <p>Tahun 2025 Pengembangan pusat kerajinan rakyat</p> <p>Tahun 2026 Pengembangan iklim dan daya saing investasi</p>	Sektor pertanian terhadap PDRB 2. Produktivitas Padi atau bahan pangan lokal lainnya (ton)	<p>sarana Pertanian</p> <p>2. Program Penyediaan dan Pengembangan sarana Pertanian</p> <p>3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.</p> <p>5. Program Perizinan Usaha Pertanian</p> <p>6. Program Penyuluhan Pertanian.</p>
------------	------------------------	---	--	---	---	--

Sumber : RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021–2026



Tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Dinas Pertanian dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan akan diterjemahkan menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan pembangunan Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan selama 5 (lima) tahun kedepan adalah :

- a. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
- b. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun ke depan adalah:

- 1.** Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
- 2.** Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan

Program Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program per pagu sebagaimana tercantum dalam RPJMD serta sesuai dengan Misi ke-4 Kabupaten Toraja Utara yaitu "*Reformasi Birokrasi*" dan Misi ke-5 yaitu "*Penguatan Pertumbuhan Ekonomi*", yang selanjutnya dijabarkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara selama kurun waktu 2021–2026 akan dilaksanakan sesuai dengan cakupan masing-masing program yang telah ditentukan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada masing-masing program yang telah

dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 90 Tahun 2019 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatannya adalah :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - d. Administasi Umum Perangkat Daerah
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
2. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Kegiatannya adalah :
 - a. Pengawasan Penggunaan sarana Pertanian
 - b. Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan dan mikroorganisme kewenangan kabupaten/kota
 - c. Peningkatan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam daerah kabupaten/kota
 - d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer
 - e. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah kabupaten/kota
 - f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) daerah provinsi lain.
3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
 - a. Pengembangan Prasarana Pertanian
 - b. Pembangunan Prasarana Pertanian
 - c. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam daerah kabupaten/kota



- d. Pengembangan lahan penggembalaan umum
- 4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
 - a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam daerah kabupaten/kota
 - b. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan daerah kabupaten/kota
 - c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah kabupaten/kota
 - d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner
- 5. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
 - a. Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota
- 3.** Program Perizinan usaha pertanian
 - a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota
 - b. Izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan
- 7. Program Program Pennyuluhan pertanian
 - a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

2. Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara dapat dilihat pada Tabel 7 berikut :

Tabel 6. Penetapan Kinerja Perubahan Dinas Pertanian Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	59,00 (CC)
2.	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing Produk Tanaman Pangan,	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.78

	Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan	Kontribusi sub sektor Pertanian terhadap PDRB	12.69
		Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	2.42
		Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	0.67

3. Perjanjian Kinerja

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD)

No.	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	59,00 (CC)
2	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	2	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.78
		3	Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	12.69
		4	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	2.42
		5	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	0.76
JUMLAH ANGGARAN				

	PROGRAM	ANGGARAN
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 41.452.431
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 6.699.087.112
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 24.900.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 521.921.214
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 824.398.870
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 125.455.840



II	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN		
1	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Rp	245.845.875
2	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp	18.078.507
3	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota lain	Rp	1.618.719.645
III	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		
1	Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	1.591.513.700
2	Pembangunan Prasarana Pertanian	Rp	308.512.474
IV	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER		
1	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp	610.540.000
2	Penerapan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	34.530.360
V	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		
1	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Rp	196.942.188
VI	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		
1	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Rp	333.838.900
	<u>JUMLAH TOTAL</u>	Rp	<u>13.195.736.366</u>



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Kinerja

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban atas kinerja suatu organisasi.

Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara merupakan suatu organisasi perangkat daerah yang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban atas kinerjanya setiap tahun. Laporan pertanggungjawaban yang disebut dengan istilah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, penyusunannya mengacu kepada amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini antara lain menyajikan perbandingan antara target tiap indikator kinerja dengan realisasi kinerja tahun pelaporan dan membandingkan capaian kinerja tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya.

Dalam membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi kinerja yang dicapai dilakukan pengukuran capaian kinerja sasaran dengan rumus :

$$\% \text{ Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh pencapaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk analisis atau penjelasan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis, ditetapkan kategori penilaian capaian indikator kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	91% ≤	Sangat Tinggi
2.	76% s.d 90%	Tinggi
3.	66% s.d 75%	Sedang
4.	51% s.d 65%	Rendah
5.	50%	Sangat Rendah

Sumber Data : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Pertanian terdapat pada Tabel 7 berikut :

Tabel 7. Pengukuran Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja Utama	Formulasi/Cara pengukuran
1.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Capaian Kinerja (Inspektorat)
2.	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB Dari Sektor Pertanian/Perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100 \%$
	Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi Sektor Pertanian (Palawija)}}{\text{Jumlah PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan}} \times 100 \%$
	Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras)}}{\text{Jumlah PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan}} \times 100 \%$
	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi Sektor Peternakan}}{\text{Jumlah PDRB Sektor Pertanian/Perkebunan}} \times 100 \%$

2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Hasil pengukuran terhadap Sasaran 1 yaitu meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur pencapaian kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023 terdapat pada Tabel 8 berikut :

Tabel 8. Hasil Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi**	% Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perencanaan, Pengelolaan Keuangan, Disiplin dan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	57,50 (CC)	66,14 (B)	115,02

Nilai Sakip Perangkat Daerah

Nilai Sakip Dinas Pertanian Tahun 2023 ditetapkan target 57,50 (CC) dan Realisasi Tahun 2023 sebesar 66,14 (B).hal ini bisa terjadi karena tercapainya pemenuhan kelengkapan laporan. Disamping itu kualitas pelaporan juga semakin baik. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara untuk tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Hasil Evaluasi Tahun 2022
A	Perencanaan Kinerja	30	22,70
B	Pengukuran Kinerja	25	15,00
C	Pelaporan Kinerja	15	8,18
D	Evaluasi Internal	10	6,13
E	Pencapaian Kinerja	20	14,13
JUMLAH		100	66,14

Poin a s/d d menyajikan hasil penilaian atas penerapan SAKIP pada Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara dan poin e merupakan pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung.

Hasil evaluasi diketahui beberapa hal yang dianggap perlu mendapat penyempurnaan :

1. Perencanaan Kerja

- Renstra belum dipublikasikan.



- Perjanjian Kinerja belum dipublikasikan.
- Rencana Kerja Tahunan/Rencana Kerja belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- Target Kinerja yang diperjanjikan belum digunakan untuk mengukur keberhasilan.

2. Pengukuran Kinerja

- Indikator Kinerja Utama belum dipublikasikan.
- Pengumpulan data kinerja atas rencana aksi masih belum dilakukan secara berkala.
- Pengukuran Kinerja belum dikembangkan melalui teknologi informasi.
- Indikator Kinerja Utama masih belum direviu secara berkala
- Pengukuran Kinerja atas Rencana Aksi belum digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala.

3. Pelaporan Kinerja

- Laporan Kinerja tidak disampaikan tepat waktu.
- Laporan Kinerja belum di upload ke dalam website.
- Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan.
- Informasi yang disajikan belum menyeluruh di gunakan untuk perbaikan perencanaan.

4. Evaluasi Internal

- Evaluasi Program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi - rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
- Evaluasi Program belum sepenuhnya memberikan rekomendasi perbaikan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan.

5. Capaian Kinerja

- Berdasarkan pengukuran kinerja atas capaian kinerja tahun 2022 masih terdapat capaian kinerja sasaran dan kinerja output kegiatan yang belum memenuhi target dari yang ditetapkan.



Dan hasil pengukuran terhadap Sasaran 2 yaitu meningkatnya Produktifitas dan Daya Saing Produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2023 terdapat pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9. Hasil Pengukuran capaian kinerja terhadap sasaran 2 (dua)

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.25(%)	15.78(%)	101.63
		Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	13,90(%)	12,69(%)	91.29
		Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB	2.59(%)	2.42(%)	93.43
		Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	1.01(%)	0.76(%)	75,4

Keterangan : **) Angka sangat sementara/ *Very preliminary figures BPS 2024*

A. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Nilai Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan ditetapkan target 15,25% dan Realisasi Tahun 2023 sebesar 15,78%. Formula perhitungan adalah :

$$\text{Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan} = \frac{1.518.900}{9.624.000} \times 100\% = 15.78\%$$

Jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan sebesar 15,25 % dan capaian tahun sebelumnya, maka terjadi peningkatan persentase PDRB Pertanian. Hal ini bisa terjadi karena peningkatan capaian produksi di sektor Kehutanan dan Perikanan.



Tabel Produksi Perikanan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya pendapatan masyarakat pelaku usaha perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton	23.00	21,50	93 %
		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	1.697	1.600	94 %
2.	Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu	Ketersediaan Energi	Kkal/ Kapita/ Hari	2.327,81	2.100	90 %
		Ketersediaan Protein	Gram/ Kapita /Hari	66,05	60	91 %

Tabel Produksi Hasil Hutan Kabupaten Toraja Utara

No	Kecamatan	Luas Areal (Ha)	Jenis Hasil Hutan	Target Produksi (Ton/Tahun)	Realisasi (Ton)	% Pencapaian
1.	Rantebua	200	Gedah Pinus	200	58,52	29,26
2.	Awan Rantekarua	199,42	Gedah Pinus	210	50,28	23,93
3.	Nanggla	544	Gedah Pinus	60	29,93	49,88
4.	Buntao'	171	Gedah Pinus	6	12,98	216,33

Sumber data UPTD KPH Saddang II

B. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian

Nilai Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian ditetapkan target 13,90% dan Realisasi Tahun 2023 sebesar 12,69 %. Formula perhitungan adalah:

$$\text{Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian} = \frac{200.900,06}{1.582.000,30} \times 100\% = 12.69\%$$

Adanya penurunan dari target karena terjadi musim kemarau yang berkepanjangan akibat dari fenomena pemanasan suhu muka laut yang biasa disebut "Elnino" mengakibatkan produksi sub sektor pertanian dalam hal ini padi, jagung dan palawija terjadi penurunan. Berdasarkan data dari BPS tahun 2023 persentase capaian ini masih sangat bersifat sementara.

C. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan

Nilai Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan ditetapkan target 2,59 % dan Realisasi tahun 2023 sebesar 2,42 %. Formula perhitungan adalah:

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan} &= \\ &= \frac{38.400,79}{1.582.000,30} \times 100\% = 2,42\% \end{aligned}$$

Adanya penurunan dari target karena adanya kecenderungan terjadi penurunan produksi sub sektor perkebunan terutama Produksi Kopi. Hal yang sama juga terjadi pada komoditi perkebunan lainnya. Faktor yang mempengaruhi adalah musim kemarau yang berkepanjangan serta umumnya perkebunan yang ada adalah perkebunan rakyat. Berdasarkan data dari BPS tahun 2024 persentase capaian ini masih sangat bersifat sementara.

E. Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan

Nilai Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan ditetapkan target 1,01 % dan Realisasi Tahun 2023 sebesar 0,76 %. Formula perhitungan adalah :

$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan} &= \\ &= \frac{12.100,48}{1.582.000,30} \times 100\% = 0,76\% \end{aligned}$$

Adanya penurunan produksi dari target karena adanya kecenderungan terjadi penurunan populasi ternak sub sektor peternakan terutama populasi ternak babi dan kerbau. hal ini terjadi penyakit pada ternak babi yang disebabkan virus African Swine Fever (ASF) dan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada ternak kerbau mengakibatkan banyak ternak babi dan kerbau yang mati. Berdasarkan data dari BPS tahun 2023 persentase capaian ini masih sangat bersifat sementara.



F. Analisis Capaian Akuntabilitas Kinerja

Tabel 10. Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Starategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	
				2022 (n-1)	2023
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	57,50 (CC)	8,64 %	66,14 (B)
2.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,25 %	0,53 %	15,78 (%)
		Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	13,99 %	-1,30 %	12,69 (%)
		Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	2,59 %	-0,17 %	2,42(%)
		Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	1,01 %	0,25 %	0.76 (%)

Keterangan : **) Angka sangat sementara/*Very preliminary figures BPS 2023*

Tabel 11. Realisasi Kinerja 2023 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Starategis	Indikator Kinerja Utama	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2023**	Tingkat Kemajuan (%)
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	62,00 (B)	66,14 (BB)	106,68
2.	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15,10(%)	15.78(%)	104,50
		Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	13,66(%)	12,69(%)	92,90
		Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	2,68(%)	2.42(%)	90,30
		Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	2,02(%)	0.76(%)	37,62

Keterangan : **) Angka sangat sementara/ *Very preliminary figures* BPS 2023

Dari tabel diatas dapat disampaikan bahwa :

6. Berdasarkan data dari BPS tahun 2023 terjadinya penurunan capaian target karena adanya pelandaian produksi pertanian secara umum. Hal ini di sebabkan karena adanya factor penyakit pada hewan ternak serta musim kemarau yang berkepanjangan.
7. Perhitungan nilai SAKIP SKPD adalah penilaian dari Inspektorat Kabupaten. Adanya peningkatan nilai Sakip karena adanya perbaikan kualitas pelaporan.

G. Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan OPD Tahun 2023

Tabel 12. Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 13. Laporan Capaian Kinerja dan Anggaran

No	Sasaran/Program	Indikator	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efesiensi	Ket
			Target	Realisasi	Capaian	Alokasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)		
I	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan, pengelolaan keuangan, disiplin dan kapasitas sumberdaya aparatur/ Program 3.27.1 Program Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	57,50 (CC)	66,14 (B)	115,14	13.195.736.366	10.717.951.438	81,22	33,92	Efisien
II	Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	15.25(%)	15.79(%)	101,63					
		Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	13,90(%)	12,69(%)	91.29	4.958.520.899	2.968.403.598	59,86	31,43	Efisien
		Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB	2.59(%)	2.42(%)	93.43	149.168.306	132.224.200	88,64	4,79	Efisien
		Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB	1.01(%)	0.76(%)	75,24	2.281.868.502	1.634.969.721	71,65	3,59	Efisien
1	3.27.2 Program					8.237.215.467	7.748.547.840	94.07		

LKjIP DINAS PERTANIAN KABUPATEN TORAJA UTARA

	Penunjang Pemerintah Kab/Kota	Urusan									
2	3.27.2	Program penyediaan pengembangan pertanian	dan	sarana				1.882.644.017	1.265.340.448	67,21	
3	3.27.3	Program penyediaan pengembangan pertanian	dan	prasarana				1.900.026.174	670.747.897	35,30	
4	3.27.4	Program pengendalian hewan dan masyarakat veteriner	kesehatan	kesehatan				645.070.360	518.504.273	80,38	
5	3.27.5	Program Pengendalian dan Penanggulangan Pertanian	Bencana					196.942.188	180.998.080	91,90	
6	3.27.6	Program Penyuluhan pertanian						333.838.160	333.812.900	99,99	

Ket :

1. Efisien = + (Positif)
2. Tidak Efisien = - (Minus)



Berdasarkan Tabel 13 yaitu capaian kinerja dan anggaran menunjukkan bahwa terjadinya perbedaan antara capaian target kinerja dengan realisasi anggaran pada tahun 2023. Dengan realisasi anggaran pada masing-masing program yang tidak mencapai 100 %, disebabkan ketersediaan anggaran pada kegiatan pada pokok-pokok pikiran DPR dan hutang tahun 2020.

**TABEL 11. LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN APBD
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

PERANGKAT DAERAH : Dinas Pertanian Kabupaten Toraja Utara

KODE				PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET	ANGGARAN (Rp)	FISIK (%)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
3				URUSAN						
3	27			URUSAN PERTANIAN BIDANG PEMERINTAHAN						
3	27	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA			8,237,215,467		7,748,547,840	94.07
3	27	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			41,452,431		35,526,100	85.70
3	27	1	2.01	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renstra dan Renja Dinas Pertanian	1 Dokumen	9,078,431	100	3,952,750	43.54
3	27	1	2.01	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Bulan	32,374,000	100	31,573,350	97.53
3	27	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,699,087,112		6,620,670,535	98.83
3	27	01	2.02	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang mendapat Gaji dan Tunjang ASN	70 Orang/ Bulan	6,699,087,112	100	6,620,670,535	98.83
3	27	01	2.05	Pendidikan dan Pelatihan, Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			24,900,000		24,900,000	100.00
3	27	01	2.02	01 Pendidikan dan Pelatihan, Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang	24,900,000	100	24,900,000	100.00
3	27	1	2.06	Administasi Umum Perangkat Daerah			521,921,214		261,654,040	50.13
3	27	01	2.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	5 Unit	32,100,000	100	12,500,000	38.94
3	27	01	2.06	03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	3 Jenis	4,749,000	100	1,140,000	24.01
3	27	01	2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang tersedia	15 Jenis	139,740,500	100	50,477,500	36.12
3	27	01	2.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	2 Jenis	12,633,182	100	10,025,850	79.36
3	27	01	2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	1 Dokumen	2,000,000	100	1,280,000	64.00
3	27	01	2.06	07 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang tersedia	1 Paket	3,980,000	100	0	0
3	27	01	2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	7,680,000	100	7,500,000	97.66
3	27	01	2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Luar Daerah dan Dalam Daerah yang diikuti	150 Laporan	319,038,532	100	178,730,690	56.02
3	27	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			824,398,870		685,125,009	83.11
3	27	01	2.08	01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	2,187,370	100	2,184,000	99.85
3	27	01	2.08	02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Laporan	45,811,500	100	23,303,009	50.87
3	27	01	2.08	04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Laporan	776,400,000	100	659,638,000	84.96
3	27	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			125,455,840		120,672,156	96.19
3	27	01	2.09	01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jenis Kendaraan Dinas atau Kendaraan Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasioanl Roda 4 dan Roda 2 yang Terpelihara dan Terbayar Pajaknya	3 Jenis	120,805,840	100	120,672,156	99.89
3	27	01	2.09	09 Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Gedung	4,650,000	100	0	0
3	27	2		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			1,882,644,017		1,265,340,448	67.21
3	27	2	2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			245,845,875		148,875,000	60.56
3	27	2	2	01 Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Tahun	245,845,875	100	148,875,000	60.56

3	27	2	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			18,078,507		0	0
3	27	2	2.02	02	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan SDG Hewan/Tanaman	1 Jenis	18,078,507	100	0	0
3	27	2	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			1,618,719,635		1,116,465,448	68.97
3	27	2	2.06	01	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten dan Kota Lain	2040 Ekor	688,750,000	100	209,688,750	30.44
3	27	2	2.06	02	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1000 Kg	929,969,635	100	906,776,698	97.51
3	27	3			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			1,900,026,174		670,747,897	35.30
3	27	3	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			1,591,513,700		414,708,050	26.06
3	27	3	2.01	01	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	5 Jenis	1,591,513,700	100	414,708,050	26.06
3	27	3	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			308,512,474		256,039,847	82.99
3	27	3	2.02	01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Terbangunnya, Terehabilitasinya dan terpeliharanya Jaringan Irigasi Usaha Tani	1 Unit	24,679,312	100	0	0
3	27	3	2.02	09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangunnya, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	1 Unit	283,833,162	100	256,039,847	90.21
3	27	4			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			645,070,360		518,504,273	80.38
3	27	4	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			610,540,000		518,504,273	84.93
3	27	4	2.03	01	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Bulan	8,240,000	100	8,232,000	99.90
3	27	4	2.03	02	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Bulan	602,300,000	100	510,272,273	84.72
3	27	4	04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			34,530,360		0	0
3	27	4	04	04	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	12 Kali	34,530,360	100	0	0
3	27	5			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			196,942,188		180,998,080	91.90
3	27	5	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			196,942,188		180,998,080	91.90
3	27	5	2.01	02	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terlaksananya Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Lokasi	47,773,882	100	47,773,880	100.00
3	27	5	2.01	03	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10 Ha	149,168,306	100	133,224,200	89.31
3	27	7			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			333,838,160		333,812,900	99.99
3	27	5	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			333,838,160		333,812,900	99.99
3	27	5	2.01	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	1 Lokasi	241,500,000	100	241,475,000	99.99
3	27	7	2.01	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	4 Unit	92,338,160	100	92,337,900	100.00
JUMLAH TOTAL								13,195,736,366	100	10,717,951,438	81.22

Toraja Utara, Januari 2024

Kepala Dinas Pertanian,

LUKAS P. DATUBARRI, SP
NIP. 197303041999031008

**CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN TORAJA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2023**

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Pilihan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/KEG	TARGET		REALISASI		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD
					Kinerja	Rupiah	Kinerja	Rupiah			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Pertanian	Dinas Pertanian	Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja Dinas Pertanian	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		8,237,215,467		7,748,547,840			
1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		41,452,431		35,526,100			
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	9,078,431	1 Dokumen	3,952,750			
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	32,374,000	1 Dokumen	31,573,350			
2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6,699,087,112		6,620,670,535			
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan P3K (Gaji dan TPP)	83 Orang	6,699,087,112	83 Orang	6,620,670,535			
3				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		24,900,000		24,900,000			
				Pendidikan dan Pelatihan, Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	3 Orang	24,900,000	3 Orang	24,900,000			
4				Administasi Umum Perangkat Daerah		521,921,214		261,654,040			
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	32,100,000	10 Paket	12,500,000			
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5 Paket	4,749,000	5 Paket	1,140,000			
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15 Paket	139,740,500	15 Paket	50,477,500			
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2 Paket	12,633,182	2 Paket	10,025,850			
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen	2,000,000	1 Dokumen	1,280,000			
				Penyediaan Bahan atau Material	1 Paket	3,980,000		0			
				Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Paket	7,680,000	12 Paket	7,500,000			
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	319,038,532	150 Laporan	178,730,690			
5				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		824,398,870		685,125,009			
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5 Laporan	2,187,370	5 Laporan	2,184,000			
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	45,811,500	1 Tahun	23,303,009			
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Jasa Layanan	776,400,000	1 Jasa Layanan	659,638,000			
6				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		125,455,840		120,672,156			

				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Jenis	120,805,840	2 Jenis	120,672,156			
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4 Unit	4,650,000	4 Unit	0			
II	Pertanian	Dinas Pertanian	<u>Peningkatan Pengembangan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan</u>	<u>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</u>		<u>1,882,644,017</u>		<u>1,265,340,448</u>			
1				<u>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</u>		<u>245,845,875</u>		<u>148,875,000</u>			
				Pengawasan Pembangunan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	100 Unit	245,845,875		148,875,000			
2				<u>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</u>		<u>18,078,507</u>		<u>0</u>			
				Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	1 Jenis	18,078,507		0			
3				<u>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kab/Kota Lain</u>		<u>1,618,719,635</u>		<u>1,116,465,448</u>			
				Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	2040 Ekor	688,750,000		209,688,750	Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)	Memaksimalkan Koordinasi dan Konsultasi di	
				Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lainnya	1000 Kg	929,969,635		906,776,698			
III			<u>Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan</u>	<u>Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian</u>		<u>1,900,026,174</u>		<u>670,747,897</u>			
1				<u>Pengembangan Prasarana Pertanian</u>		<u>1,591,513,700</u>		<u>414,708,050</u>			
				Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	5 Jenis	1,591,513,700	5 Jenis	414,708,050	Calon Petani Calon Lokasi (CPCL)	Memaksimalkan Koordinasi dan Konsultasi di Lapang	
2				<u>Pembangunan Prasarana Pertanian</u>		<u>308,512,474</u>		<u>256,039,847</u>			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	20 Hektar	24,679,312	0	0			
				Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	1 Unit	283,833,162	1 Unit	256,039,847			

IV			<u>Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Medik Veteriner</u>	<u>Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Medik Veteriner</u>		645,070,360		518,504,273		
1				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota		610,540,000		518,504,273		
				Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Kali	8,240,000		8,232,000		
				Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Kali	602,300,000		510,272,273		
2				<u>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</u>		34,530,360		0		
				Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	6 Kali	34,530,360		0		
V			<u>Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Penanganan Kebakaran)</u>	<u>Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</u>		196,942,188		180,998,080		
1				<u>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kab/Kota</u>		196,942,188		180,998,080		
				Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1 Lokasi	47,773,882	1 Lokasi	47,773,880		
				Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10 Hektar	149,168,306	10 Hektar	133,224,200		
VI			<u>Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Petani dan SDM Pertanian</u>	<u>Program Penyuluhan Pertanian</u>		333,838,160		333,812,900		
1				<u>Pelaksanaan Penyuluh Pertanian</u>		333,838,160		333,812,900		
				Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluh Pertanian di Kecamatan dan Desa	1 Kegiatan	241,500,000	1 Kegiatan	241,475,000		
				Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	4 Unit	92,338,160	4 Unit	92,337,900		
JUMLAH TOTAL I+II+III+IV+V+VI						13,195,736,366		10,717,951,438		

Toraja Utara, Januari 2024
Kepala Dinas Pertanian,

Lukas P. Datubbari, SP
NIP. 19730304 199903 1 008